



Analisis Pengungkapan Keberlanjutan Keuangan Berbasis Website pada Universitas Islam Negeri di Indonesia

Sri Andriani¹, Agusdiwana Suarni², Masrullah³

^{1,2,3}Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomin dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: ¹andrianisrii26@gmail.com, ²agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id, ³masrullah@unismuh.ac.id

Abstract: *The importance of transparency and accountability through digital media is the main reason for this research, considering that websites are a crucial tool for universities in building their image and communicating their social responsibility to the public. This study aims to analyze the level of website-based financial visits at State Islamic Universities (UIN) in Indonesia through the perspectives of Stakeholder Theory and Signaling Theory. The method used is descriptive quantitative with a population of all State Islamic Universities (PTAIN) under the auspices of the Indonesian Ministry of Religious Affairs, where 35 UINs were selected as samples using a purposive sampling technique. Data were collected through observation of website content based on the Global Reporting Initiative (GRI) standard indicators. The results show that although most UINs have official websites as their main information media, the overall transmission rate is still at an average of 46.91% (categorized as poor). Specifically, the social aspect received the highest score (58.68%), followed by the economic aspect (54.49%), while the environmental aspect was the lowest (27.56%). The findings indicate low accessibility of formal reports, with only UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi having published a structured sustainability report, and only UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto providing publicly available financial reports. These low figures suggest that Islamic higher education institutions in Indonesia have not yet optimally utilized digital platforms for permit reporting. These findings serve as important evaluation material for university administrators to strengthen digital information governance to increase stakeholder trust.*

Keywords: *Sustainability Disclosure, Website, State Islamic University, GRI*

Abstrak: Pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui media digital menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan, mengingat website merupakan sarana krusial bagi perguruan tinggi dalam membangun citra serta mengomunikasikan tanggung jawab sosialnya kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan keberlanjutan keuangan berbasis website pada Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia melalui perspektif Stakeholder Theory dan Signaling Theory. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di bawah naungan Kementerian Agama RI, di mana 35 UIN dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi konten website berdasarkan indikator standar Global Reporting Initiative (GRI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar UIN telah memiliki website resmi sebagai media informasi utama, tingkat pengungkapan keberlanjutan secara keseluruhan masih berada pada rata-rata 46,91% (kategori kurang). Secara spesifik, aspek sosial memperoleh skor tertinggi (58,68%), diikuti aspek ekonomi (54,49%), sementara aspek lingkungan menjadi yang terendah (27,56%). Temuan ini menunjukkan rendahnya aksesibilitas laporan formal, di mana hanya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability report) secara terstruktur, dan hanya UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang menyediakan laporan keuangan terbuka bagi publik. Rendahnya angka pengungkapan ini menyimpulkan bahwa institusi pendidikan tinggi Islam di

Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan platform digital untuk pelaporan keberlanjutan. Hasil ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pengelola perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola informasi digital demi meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Sustainability Disclosure, Website, Universitas Islam Negeri, GRI

1. Pendahuluan

Konsep keberlanjutan (sustainability) telah berkembang pesat dan menjadi perhatian utama berbagai jenis organisasi di seluruh dunia, termasuk institusi pendidikan tinggi. Keberlanjutan secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara tiga dimensi utama dalam suatu organisasi, yaitu kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan prinsip keberlanjutan menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas yang dilakukan (Jusuf et al., 2020). Menurut Almashhadani & Almashhadani, (2023), keberlanjutan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini menggambarkan bagaimana sebuah organisasi mengelola dampak lingkungan, memberi kontribusi sosial, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan.

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, penerapan prinsip keberlanjutan masih bersifat sukarela dan belum merata. Laporan keberlanjutan merupakan dokumen komprehensif yang memuat informasi mengenai kinerja institusi, baik keuangan maupun nonkeuangan, yang berkaitan dengan upaya mencapai keberlanjutan. Minimnya jumlah laporan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses operasional di sebagian besar Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia (Jusuf et al., 2020).

Tata kelola Universitas Islam Negeri (UIN) memiliki karakteristik distingtif melalui penyatuan nilai-nilai spiritual dan moral yang melampaui standar akuntabilitas sekuler. Sebagai lembaga pendidikan yang mengemban misi dakwah, UIN memiliki tanggung jawab moral yang sejalan dengan kerangka *Islamic Social Responsibility* (ISR). Dalam konteks ini, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan pengejawantahan dari *Maqashid Shariah* guna menjaga kemaslahatan publik melalui prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-ummah*. Pentingnya pelaporan kinerja sosial serta lingkungan di UIN menjadi fundamental karena institusi ini memegang amanah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitasnya berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, selaras dengan peran manusia sebagai *khalifah fi al-ardh*. Dengan mengimplementasikan standar transparansi yang komprehensif, UIN tidak hanya memperkuat legitimasi di mata pemangku kepentingan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pelopor manajemen organisasi yang berbasis etika religius serta keberlanjutan yang kuat secara teoretis maupun kontekstual.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pelaporan keberlanjutan tidak lagi hanya dipublikasikan melalui laporan cetak, tetapi juga melalui media digital seperti situs web resmi perguruan tinggi. Pengungkapan keberlanjutan berbasis website (*online sustainability reporting*) menjadi metode yang lebih efisien dan transparan untuk menyampaikan informasi, karena memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pemanfaatan website sebagai media informasi utama bagi perguruan tinggi memungkinkan aksesibilitas data yang lebih luas dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan tren global di mana universitas di berbagai negara, termasuk Malaysia, telah mulai mengoptimalkan platform digital untuk mendokumentasikan kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan guna memperkuat transparansi institusional (Ramli & Suarni, 2026). Keberadaan website tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban publik. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti bagaimana UIN di Indonesia menerapkan pengungkapan keberlanjutan secara daring dan sejauh mana keterbukaan informasi ini dapat mendukung akuntabilitas publik.

Rendahnya tingkat pengungkapan keberlanjutan keuangan pada UIN dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga ahli yang memahami penyusunan laporan keberlanjutan maupun dari sisi pendanaan. Selain itu, sebagian perguruan tinggi lebih fokus dalam memenuhi kewajiban akademik yang bersifat mendesak, seperti akreditasi, dibandingkan meluangkan waktu dan sumber daya untuk menyusun laporan

keberlanjutan yang masih bersifat opsional (Zrnić & Perić, 2020). Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman pimpinan perguruan tinggi tentang pentingnya pelaporan keberlanjutan serta persepsi bahwa proses penyusunannya kompleks. Belum adanya pedoman khusus mengenai pengungkapan keberlanjutan di lingkungan UIN juga menjadi hambatan teknis yang signifikan. Ditambah lagi, tidak adanya tuntutan dari regulator pendidikan tinggi membuat laporan ini belum menjadi prioritas bagi kebanyakan perguruan tinggi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas di lingkungan UIN serta dukungan kelembagaan dalam bentuk panduan dan pendampingan teknis sehingga lebih banyak perguruan tinggi yang dapat mengadopsi praktik pengungkapan keberlanjutan di masa mendatang.

Selama satu dekade terakhir, isu keberlanjutan di perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi topik penting yang menuntut perhatian lebih serius. Masyarakat kini menaruh ekspektasi besar bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan konsep keberlanjutan, tetapi juga menjadi pelaku yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam operasional sehari-hari (Popescu et al., 2020). Tantangan pembangunan berkelanjutan menuntut perguruan tinggi untuk menata ulang model pengelolaan institusi, memperbarui kurikulum, serta merespons perubahan kebutuhan generasi muda. Generasi saat ini mengharapkan perguruan tinggi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga lingkungan dan mendorong terciptanya masyarakat yang berkelanjutan (Moneva et al., 2023). Dengan demikian, perguruan tinggi yang berkomitmen pada keberlanjutan berperan sebagai agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pembaruan misi, tujuan, dan konteks operasional mereka (Popescu et al., 2020).

Dalam hal ini, peran para pemangku kepentingan di perguruan tinggi, terutama pimpinan dan tenaga pendidik, sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan kampus. Mereka perlu memiliki kesadaran dan visi bersama bahwa *sustainability* merupakan nilai penting yang harus diwariskan kepada generasi mendatang (Mian et al., 2020). Lebih jauh lagi, implementasi strategi keberlanjutan tidak hanya memberi manfaat di lingkungan kampus, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi sektor-sektor lain dalam masyarakat. Dengan komitmen penuh dari seluruh civitas akademika, UIN dapat menjadi penggerak dalam perluasan praktik berkelanjutan di masa depan (Jusuf et al., 2020).

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji "Analisis Pengungkapan Keberlanjutan Keuangan Berbasis Website pada Universitas Islam Negeri di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat pengungkapan keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan keuangan pada website resmi seluruh UIN di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

2.1 Stakeholder Theory

Stakeholder Theory diperkenalkan oleh R. Edward Freeman (1984), yang menyatakan bahwa organisasi bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder Theory berargumen bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Zain et al., 2021). Keberhasilan organisasi pun tidak hanya dilihat dari aspek keuangan, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi harapan stakeholder. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) merupakan diskursus fundamental dalam ranah etika bisnis dan manajemen organisasi (Mahajan et al., 2023).

Teori ini memiliki tiga dimensi: deskriptif, instrumental, dan normatif. Dalam konteks universitas, teori ini menekankan pentingnya transparansi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Stakeholder Theory digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan pentingnya penerapan Online Sustainability Reporting (OSR) di Universitas Islam Negeri (UIN).

2.2 Signaling Theory

Michael Spence (1973) adalah pendiri teori signaling. Menurut teori ini, pihak yang memiliki lebih banyak informasi (insiders) mengungkapkan informasi untuk memberikan sinyal kepada pihak luar (outsiders). Organisasi yang baik sering mengungkapkan informasi untuk membedakan diri dari yang buruk. Untuk Universitas Islam Negeri (UIN), publikasi online laporan keuangan

dan keberlanjutan menjadi bukti positif bahwa lembaga itu transparan, akuntabel, dan berkomitmen pada keberlanjutan. Kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan dapat meningkat sebagai hasilnya.

2.3 Pengungkapan Keberlanjutan (*Sustainability Disclosure*)

Pengungkapan keberlanjutan adalah proses organisasi yang sistematis untuk menginformasikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari tindakan mereka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (Suarni & Possumah, 2024). Pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban organisasi atas tercapainya pembangunan berkelanjutan termasuk dalam praktik ini (Zrnić et al., 2020). Pengungkapan keberlanjutan juga didefinisikan sebagai laporan tentang tindakan organisasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Agustina & Putri, 2022). Dalam konteks global dan bisnis, konsep ini paling sering merujuk pada pemenuhan kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Moggi, 2023)

Secara umum, laporan ketahanan lingkungan adalah laporan menyeluruh yang menggambarkan kontribusi organisasi terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam penyusunannya, dia mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), yang terdiri dari tiga standar utama: ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400). Semua standar ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keberlanjutan organisasi. Melalui hal ini, perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dampak operasional mereka, baik dari sisi finansial maupun sosial dan lingkungan tetap sejalan dengan keinginan pihak-pihak yang terkait (Paramita et al., 2025).

2.4 Manfaat Pengungkapan Keberlanjutan

Pengungkapan keberlanjutan membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan (Ardhana Chindy Putri et al., 2024). Perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya pada keuntungan dan keberlanjutan jangka panjang dengan memberikan informasi yang transparan tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan keberlanjutan dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat posisinya dalam persaingan bisnis. Selain itu, pengungkapan keberlanjutan meningkatkan kepercayaan investor karena menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengelola risiko dan peluang secara berkelanjutan (Purnamasari & Trimeiningrum, 2022). Sangat mungkin bagi bisnis terbuka untuk mendapatkan dukungan modal yang dapat membantu mereka mengembangkan inovasi dan menjadi lebih kompetitif (Arifin, 2024). Pengungkapan keberlanjutan (*Sustainability Disclosure*) memberikan manfaat strategis bagi perusahaan, baik dari sisi finansial maupun reputasi (Xu et al., 2023).

Laporan keberlanjutan, di sisi lain, berfungsi sebagai alat evaluasi internal yang membantu manajemen mengembangkan strategi dan menilai kinerja. Oleh karena itu, bisnis memiliki kemampuan untuk mengelola risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang (Rahmania, 2025). Secara umum, pengungkapan keberlanjutan adalah sarana komunikasi strategis yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan dari berbagai pihak. Keberlanjutan menciptakan siklus positif di mana keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan saling mendukung satu sama lain. (Jun & Moon, 2021)

2.5 Pengungkapan Keuangan Intitusi Pendidikan Tinggi

Pengungkapan keuangan merupakan komponen krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada institusi publik, termasuk perguruan tinggi negeri. Sebagai entitas yang dibiayai oleh anggaran negara, Universitas Islam Negeri (UIN) berkewajiban menyajikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi tersebut mencakup laporan anggaran, realisasi anggaran, laporan keuangan tahunan, sumber pendanaan, serta rincian penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Keberlanjutan di pendidikan tinggi akhirnya bertujuan untuk menciptakan "Kampus Berkelanjutan" yang tidak hanya mandiri secara energi, tetapi juga menjadi contoh integritas moral dan transparansi ekonomi bagi masyarakat luas (An et al., 2020; Ardhana & Suarni, 2024)

Dalam penelitian ini, aspek keuangan menjadi salah satu fokus utama karena mencerminkan tingkat akuntabilitas institusi dalam pengelolaan dana publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan keuangan pada website UIN masih tergolong rendah. Dari 35 UIN yang diteliti, hanya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang secara konsisten menyajikan laporan keuangan secara terstruktur melalui situs resminya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tuntutan transparansi dan implementasi di lapangan.

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian oleh Ardhana & Suarni, (2024) menganalisis pelaporan keberlanjutan berbasis online pada Universitas Muhammadiyah di Sulawesi Selatan menggunakan analisis konten dan indeks skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan transparansi dalam sustainability reporting. Hal ini diakibatkan oleh Informasi tidak lengkap, kualitas website yang buruk, hingga adanya ketidaksesuaian dengan realitas yang ada.

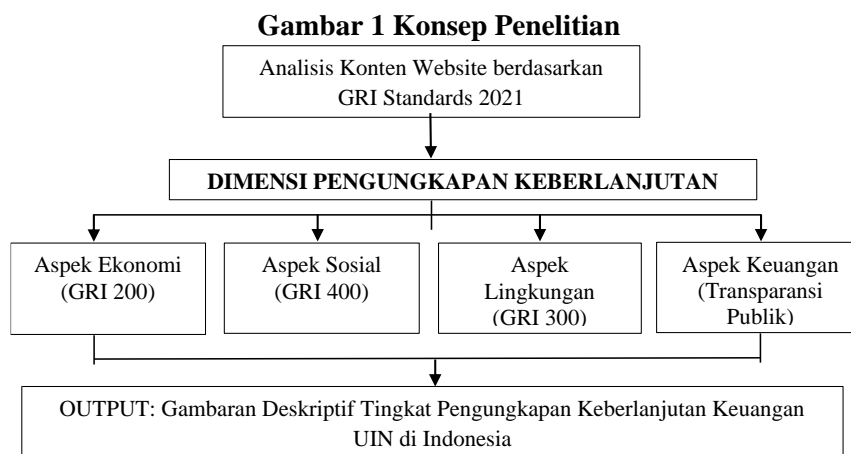
An et al. (2020), meneliti pelaporan keberlanjutan online pada universitas di Hong Kong melalui metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar universitas telah memiliki halaman khusus sustainability reporting dan aktif mengkomunikasikan kegiatan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan.

Nicolò et al. (2021) melakukan analisis terhadap pengungkapan keberlanjutan berbasis website pada universitas negeri di Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh universitas memiliki halaman sustainability, dengan dominasi isu sosial dan Covid-19, sementara aspek lingkungan masih kurang diungkap secara optimal. Hal ini terjadi karena standar GRI memberikan sinyal bahwa insitusi beroperasi dengan standar global hingga hal ini menciptakan persepsi positif bahwa universitas memiliki tata kelola yang transparan

Abello-Romero et al. (2024) melalui systematic literature review menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan di perguruan tinggi masih belum konsisten dan belum memiliki standar khusus. Selain itu, pengungkapan masih didominasi aspek lingkungan, meskipun tren pelaporan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan *Signaling Theory* sangat berkaitan dengan bagaimana struktur tata kelola internal mempengaruhi output informasi ke publik.

AlAli dan Aboud (2024) menunjukkan bahwa penerapan praktik keberlanjutan di universitas-universitas Arab Saudi masih sangat terbatas pada dimensi akademik, penelitian, sosial, dan lingkungan menurut persepsi para dosen. Menggunakan analisis Model Rasch dan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), studi ini mengungkap bahwa penyebab utama rendahnya capaian tersebut adalah belum adanya visi strategis yang jelas, kurangnya pelaporan keberlanjutan, serta ketiadaan komite khusus yang mengelola isu ini secara terpusat. Untuk mencapai keberhasilan di masa depan, penelitian ini menekankan pentingnya institusi pendidikan tinggi untuk memprioritaskan tata kelola keberlanjutan melalui pembentukan unit kerja khusus dan melakukan studi banding terhadap institusi yang telah sukses mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam sistem operasional mereka.

2.7 Kerangka Pemikiran Konseptual



Penelitian ini menggunakan Teori Pemangku Kepentingan dan Teori Sinyal untuk menganalisis transparansi informasi keberlanjutan pada situs resmi 35 UIN di Indonesia. Melalui empat dimensi utama yaitu ekonomi (GRI 200), sosial (GRI 400), lingkungan (GRI 300), dan aspek keuangan serta studi ini memetakan pola pengungkapan institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hasilnya memberikan gambaran deskriptif untuk memperkuat sinyal positif transparansi dan tata kelola dana publik di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis tingkat pengungkapan keberlanjutan pada website resmi Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di bawah naungan Kementerian Agama RI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling hingga diperoleh 35 UIN sebagai objek amatan. Data sekunder yang bersumber dari situs web resmi masing-masing universitas dikumpulkan melalui metode observasi dan dokumentasi sistematis. Penilaian dilakukan melalui pengamatan terhadap ketersediaan informasi pengungkapan menggunakan skala dikotomi, di mana setiap indikator dinilai dengan angka 1 jika tersedia dan angka 0 jika tidak ditemukan. Instrumen penelitian ini diadaptasi dari standar internasional Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 yang mencakup aspek ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400).

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan nilai rata-rata (mean) untuk memetakan persentase kemunculan setiap indikator di seluruh sampel. Hasil penilaian tersebut kemudian dikategorikan untuk menentukan apakah tingkat transparansi informasi pada website universitas masuk dalam klasifikasi cukup, rendah, atau sangat rendah. Melalui pendekatan skala dikotomi ini, peneliti dapat mengukur secara objektif sejauh mana transparansi dan akuntabilitas publik telah dijalankan melalui platform digital, yang hasilnya kemudian diinterpretasikan melalui perspektif Stakeholder Theory dan Signaling Theory (Arsyam & Tahir, 2021; Sugiyono, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 35 PTKIN, sebagian besar UIN sudah memiliki website resmi, namun tingkat pengungkapan keberlanjutan masih sangat rendah. Hanya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mempublikasikan sustainability report secara terstruktur, dan hanya UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang menyediakan laporan keuangan secara terbuka. Secara umum, informasi keberlanjutan pada website UIN masih bersifat tidak terstruktur dan belum mencakup tiga dimensi GRI (ekonomi, sosial, lingkungan) secara lengkap, sehingga menunjukkan rendahnya transparansi dan pengungkapan keberlanjutan di lingkungan PTKIN.

4.1.1 Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dalam pengungkapan keberlanjutan mencerminkan kontribusi institusi dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, baik di lingkungan internal kampus maupun masyarakat luas. Pengukuran aspek ini menggunakan 14 indikator yang diadaptasi dari GRI 200 (Ekonomi). Distribusi frekuensi hasil observasi pada aspek ekonomi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Aspek Ekonomi

| ASPECTS | INITIATIVES | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| | Frekuensi | Persentase(%) |
| <i>Ekonomi</i> | | |
| 1. Promosi masalah ekonomi | 28 | 80.00 |
| 2. Kegiatan atau program ekonomi (Publikasi keberlanjutan dan cetak biru kampus ramah lingkungan untuk penjualan, program kewirausahaan untuk masyarakat) | 10 | 28.57 |
| 3. Layanan ekonomi seperti konsultasi, biaya program akademik | 25 | 71.43 |
| 4. Praktik pengadaan misalnya Divisi Pengadaan (perizinan, perjanjian) | 15 | 42.86 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5. Informasi keuangan | 17 | 48.57 |
| 6. Penawaran dan penawaran | 18 | 51.43 |
| 7. Indikator kinerja/kinerja ekonomi | 16 | 45.71 |
| 8. Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah misalnya hibah penelitian | 25 | 71.43 |
| 9. Dampak/nilai ekonomi langsung pada pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia modal, dan sektor publik (penjualan plat nomor universitas) | 15 | 42.86 |
| 10. Investasi dan sumber daya yang cukup besar untuk mengevaluasi risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim | 9 | 25.71 |
| 11. Penghargaan atas kontribusi ekonomi | 7 | 20.00 |
| 12. Pendapatan mahasiswa (bantuan mahasiswa, biaya kuliah, dan dana abadi) | 32 | 91.43 |
| 13. Penyedia modal (perusahaan yang disponsori, nirlaba, perusahaan tambahan, hadiah swasta, hibah, dan kontrak) | 23 | 65.71 |
| 14. Sektor publik (anggaran negara/pemerintah federal) | 27 | 77.14 |
| Mean | 19.07 | 54.49 |
| Median | 17.50 | 50.00 |
| SD | 7.71 | 22.03 |

Sumber : GRI Standards 2021 (GRI 200 Ekonomi) dan Hasil Observasi Website UIN

Berdasarkan Tabel 6.1 pengungkapan aspek ekonomi pada UIN didominasi oleh indikator pendapatan mahasiswa yang mencapai 91,43% (32 UIN), karena informasi biaya kuliah dan beasiswa merupakan kebutuhan utama publik. Hal ini sejalan dengan Stakeholder Theory bahwa informasi yang paling dibutuhkan akan lebih banyak diungkapkan.

Indikator promosi isu ekonomi berada pada posisi kedua (80,00%), diikuti sektor publik (77,14%) yang menunjukkan keterkaitan UIN dengan pendanaan pemerintah. Sementara itu, layanan ekonomi dan bantuan keuangan pemerintah masing-masing mencapai 71,43%, yang menandakan adanya keterbukaan dalam layanan dan sumber pendanaan.

Namun, pengungkapan masih rendah pada indikator investasi terkait risiko iklim (25,71%) dan penghargaan kontribusi ekonomi (20,00%). Secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan aspek ekonomi sebesar 54,49% menunjukkan variasi yang cukup besar antar UIN.

4.1.2 Aspek Sosial

Aspek sosial dalam keberlanjutan mencerminkan peran institusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sosial kampus. Pengukuran aspek ini menggunakan 13 indikator yang diadaptasi dari GRI 400 (Sosial). Distribusi frekuensi hasil observasi pada aspek sosial disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Aspek Sosial

| ASPECTS | INITIATIVES | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| | Frekuensi | Persentase (%) |
| SOSIAL | | |
| 1. Penghargaan atas kontribusi sosial | 9 | 25.71 |
| 2. Kesehatan dan keselamatan kerja (Tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari-hari yang hilang, ketidakhadiran, jumlah total kematian terkait pekerjaan menurut wilayah dan jenis kelamin) | 8 | 22.86 |
| 3. Pelatihan dan pendidikan (Program pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan, dan pengendalian risiko yang diterapkan untuk membantu anggota angkatan kerja, keluarga mereka, atau anggota masyarakat terkait penyakit serius/rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan kategori karyawan) | 32 | 91.43 |

| ASPECTS | INITIATIVES | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| | Frekuensi | Persentase (%) |
| 4. Keberagaman dan kesempatan yang sama/kesetaraan gender | 12 | 34.29 |
| 5. Praktik yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan | 7 | 20.00 |
| 6. Promosi isu sosial misalnya berita, posting media sosial | 30 | 85.71 |
| 7. Indikator Kinerja Sosial | 32 | 91.43 |
| 8. Dampak terhadap masyarakat lokal | 32 | 91.43 |
| 9. Kepatuhan terhadap peraturan umum | 4 | 11.43 |
| 10. Mekanisme pengaduan atas dampak pada masyarakat (Audit internal, strategi pencegahan penipuan, prosedur respons penipuan, integritas, dan tata kelola, kebijakan anti penyuapan dan korupsi) | 10 | 28.57 |
| 11. Aktivitas dan layanan komunitas/partisipasi publik (Kontribusi mahasiswa, fakultas, dan staf terhadap komunitas/kemitraan untuk keberlanjutan dengan entitas pendidikan, bisnis, dan pemerintah) | 31 | 88.57 |
| 12. Inisiatif dalam pembelajaran layanan untuk masyarakat (nilai-nilai inti, meningkatkan kesadaran, beasiswa) | 31 | 88.57 |
| 13. Strategi dan manajemen yang berkaitan dengan isu sosial | 29 | 82.86 |
| Mean | 20.54 | 58.68 |
| Median | 29 | 82.86 |
| SD | 11.92 | 34.06 |

Sumber: GRI Standards 2021 (GRI 400 Sosial) dan Hasil Observasi Website UIN

Berdasarkan Tabel 6.2, pengungkapan aspek sosial pada UIN menunjukkan pola yang bervariasi, dengan beberapa indikator memiliki tingkat capaian sangat tinggi. Tiga indikator tertinggi, yaitu pelatihan dan pendidikan, kinerja sosial, serta dampak terhadap masyarakat lokal, masing-masing mencapai 91,43%. Tingginya pengungkapan ini mencerminkan peran UIN sebagai institusi pendidikan yang aktif dalam kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Indikator aktivitas komunitas (88,57%) serta inisiatif pembelajaran sosial termasuk beasiswa (88,57%) juga menunjukkan tingginya keterlibatan sosial UIN. Selain itu, promosi isu sosial mencapai 85,71%, yang menunjukkan aktifnya publikasi kegiatan sosial melalui website. Namun,beber apa indikator masih sangat rendah, seperti kepatuhan regulasi (11,43%), mekanisme pengaduan (28,57%), serta penghargaan kontribusi sosial (25,71%). Indikator kesehatan dan keselamatan kerja (22,86%) serta kepuasan pengguna (20,00%) juga masih minim diungkapkan. Secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan aspek sosial sebesar 58,68%, tertinggi dibandingkan aspek ekonomi dan lingkungan

4.1.3 Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan mencerminkan berbagai upaya institusi dalam pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas kampus. Pengukuran aspek ini menggunakan 17 indikator yang diadaptasi dari GRI 300 (Lingkungan). Distribusi frekuensi hasil observasi pada aspek lingkungan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Aspek Lingkungan

| ASPECTS | INITIATIVES | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| | Frekuensi | Persentase (%) |
| Lingkungan | | |
| 1. Bahan (Bahan yang digunakan berdasarkan volume atau berat/bahan yang digunakan yang didaur ulang) | 12 | 34.29 |
| 2. Energi (Konsumsi energi, pengurangan konsumsi energi) | 11 | 31.43 |
| 3. Air (Konsumsi air, pengurangan konsumsi air/daur ulang dan penggunaan kembali air, sumber air dan ekosistem/habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan air, konservasi air, pemanenan air hujan) | 7 | 20.00 |

| ASPECTS | INITIATIVES | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| | Frekuensi | Persentase (%) |
| 4. Biodiversity (Location and size of land owned, leased, managed in biodiversity habitat-rich habitats/significant impacts of activities and operations on biodiversity in or around protected area/initiative to restore habitats/number of red list and state conservation list species with habitats in area affected by university operations) | 16 | 45.71 |
| 5. Emisi (Emisi terkait gas rumah kaca/emisi lainnya) | 6 | 17.14 |
| 6. Limbah (Pembuangan air berdasarkan jenis dan tujuan termasuk metode pengolahan/tumpahan yang signifikan/sumber air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak pembuangan air dan limpasan) | 11 | 31.43 |
| 7. Daur Ulang - pusat daur ulang berbagai macam bahan seperti kertas, logam, kayu, makanan, botol, kaleng, limbah halaman, puing konstruksi, peralatan elektronik, dan berbagai macam limbah industri (oli motor, antibeku, baterai, ban, lampu neon) | 12 | 34.29 |
| 8. Pengelolaan limbah/bahan kimia (Berdasarkan jenis/metode pembuangan) misalnya limbah makanan, limbah hijau, tekstil, bahan yang dapat didaur ulang | 8 | 22.86 |
| 9. Mitigasi perubahan iklim | 11 | 31.43 |
| 10. Bangunan dan lahan (untuk mengelola lahan yang belum dikembangkan dan dikembangkan sambil memberikan pendidikan kepada ribuan mahasiswa yang tinggal di atau bepergian secara teratur ke kampus) - interaktivitas antara lingkungan alam dan kampus yang dibangun di mana bangunan berlokasi bersama dengan pohon-pohon tua yang tumbuh, pemandangan tepi danau melampaui bangunan utama, dan sekelompok kecil bebek dan angsa sering terlihat berenang dan bergelantungan di/sekitar danau | 9 | 25.71 |
| 11. Kegiatan lingkungan seperti inisiatif hijau misalnya jaringan listrik di beberapa gedung, penggunaan sepeda dan sistem tenaga surya di kampus, proyek pengungkapan plastik | 14 | 40.00 |
| 12. Penghargaan atas prestasi lingkungan | 6 | 17.14 |
| 13. Transportasi (Dampak lingkungan yang signifikan dari transportasi yang digunakan di universitas - untuk mengurangi jumlah mobil di jalan melalui pilihan mobilitas, konektivitas, dan pola penggunaan lahan) | 7 | 20.00 |
| 14. Keberlanjutan sistem pangan (menanam makanan secara berkelanjutan melalui pertanian organik) | 7 | 20.00 |
| 15. Peraturan perundang-undangan dan kepatuhan (Pernyataan kepatuhan lingkungan atau denda dan sanksi yang signifikan dalam bentuk uang atau non-uang karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan) misalnya pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, ketentuan umum untuk Manajemen Tempat Makanan | 5 | 14.29 |
| 16. Pengeluaran Lingkungan | 8 | 22.86 |
| 17. Promosi isu lingkungan misalnya berita; cetak, elektronik | 14 | 40.00 |
| Mean | 9.65 | 27.56 |
| Median | 9 | 25.71 |
| SD | 3.26 | 9.31 |

Sumber: GRI Standar 2021 (GRI 300 Lingkungan) dan penyesuaian peneliti

Berdasarkan Tabel 3 pengungkapan aspek lingkungan pada UIN merupakan yang terendah dibanding aspek lainnya, dengan rata-rata hanya 27,56%. Indikator tertinggi adalah keanekaragaman hayati (45,71%), diikuti kegiatan lingkungan dan promosi isu lingkungan masing-masing 40,00%. Sebagian besar indikator lainnya masih rendah, seperti pengelolaan energi, perubahan iklim, dan daur ulang (31–34%), serta pengelolaan air, transportasi ramah lingkungan, dan sistem pangan (20,00%). Indikator emisi gas rumah kaca dan penghargaan

lingkungan hanya 17,14%, sedangkan yang terendah adalah kepatuhan lingkungan sebesar 14,29%. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam pengungkapan keberlanjutan di UIN.

4.1.4 Aspek Keuangan

Pengungkapan aspek keuangan merupakan temuan yang paling kritis dan paling memprihatinkan dalam penelitian ini. Sebagai lembaga yang dibiayai oleh anggaran negara dan memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk uang kuliah tunggal (UKT), setiap UIN memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan kepada publik. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Dari 35 UIN yang menjadi sampel penelitian, hanya 1 (satu) UIN yang ditemukan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, terstruktur, dan mudah diakses oleh publik melalui website resminya, yaitu Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN Saizu).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, seluruh temuan penelitian dengan teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu Stakeholder Theory (Freeman, 1984) dan Signaling Theory (Spence, 1973), serta membandingkan hasil penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan dilakukan secara sistematis berdasarkan empat aspek yang diteliti.

Tabel 4. Ringkasan Perbandingan Tingkat Pengungkapan Keberlanjutan UIN

| Aspek | Rata-rata (%) | Nilai Tertinggi (%) | Nilai Terendah (%) | Kategori |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Ekonomi (GRI 200) | 54.49 | 91.43 (Pendapatan Mahasiswa) | 20.00 (Penghargaan Ekonomi) | Cukup |
| Sosial (GRI 400) | 58.68 | 91.43 (Pelatihan & Dampak Sosial) | 11.43 (Kepatuhan Regulasi) | Cukup |
| Lingkungan (GRI 300) | 27.56 | 45.71 (Biodiversitas) | 14.29 (Kepatuhan Lingkungan) | Rendah |
| Keuangan | 2.86 | Hanya 1 dari 35 UIN | - | Sangat Rendah |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

4.2.1 Analisis Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi menunjukkan rata-rata pengungkapan sebesar 54,49% (kategori cukup). Pengungkapan tertinggi terdapat pada pendapatan mahasiswa (91,43%) dan layanan ekonomi (71,43%), yang menunjukkan bahwa UIN lebih responsif terhadap kebutuhan informasi utama stakeholders seperti mahasiswa dan orang tua sesuai *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984). Sebaliknya, indikator investasi terkait risiko iklim (25,71%) dan penghargaan ekonomi (20,00%) masih rendah, menandakan keterbatasan perhatian pada keberlanjutan jangka panjang. Dari perspektif Signaling Theory (Spence, 1973), rendahnya pengungkapan keuangan (48,57%) menunjukkan belum optimalnya fungsi informasi sebagai sinyal transparansi institusi.

Temuan ini memperkuat penelitian Tiscini et al. (2022), yang menyoroti hambatan dalam transparansi informasi keuangan di perguruan tinggi Indonesia, khususnya akibat absennya regulasi spesifik mengenai laporan keberlanjutan ekonomi. Sebaliknya, studi oleh An et al. (2020) mengungkapkan bahwa universitas di Hong Kong mencapai tingkat transparansi yang lebih superior berkat dukungan regulasi yang tegas dan tuntutan pemangku kepentingan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan ekonomi di UIN Indonesia sangat bergantung pada intervensi eksternal berupa kebijakan formal dan tekanan dari stakeholders.

4.2.2 Analisis Aspek Sosial

Aspek sosial memiliki rata-rata tertinggi sebesar 58,68%. Indikator seperti pelatihan dan pendidikan, dampak masyarakat lokal (91,43%), serta aktivitas komunitas (88,57%) menunjukkan kuatnya peran sosial UIN sebagai institusi pendidikan Islam. Hal ini selaras dengan *Stakeholder Theory* yang menekankan legitimasi sosial. Dari *Signaling Theory*, aktivitas sosial menjadi sinyal positif terhadap komitmen institusi. Namun, kepatuhan regulasi (11,43%) dan mekanisme pengaduan (28,57%) masih sangat rendah, menunjukkan lemahnya transparansi tata kelola sosial.

Temuan penelitian ini mendukung hasil studi Agustina & Putri (2022), yang menyoroti kurangnya sistem pengaduan sosial yang terorganisir di perguruan tinggi Indonesia. Hal ini kontras dengan praktik di universitas Italia yang, menurut Di Vo et al. (2022), telah mengintegrasikan audit sosial dan mekanisme keluhan sistematis berbasis platform digital. Fenomena ini mengindikasikan urgensi bagi UIN di Indonesia untuk memperkuat tata kelola sosial melalui pengembangan sistem pengaduan yang lebih formal, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

4.2.3 Analisis Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan yang terendah dengan rata-rata 27,56%. Pengungkapan relatif lebih tinggi hanya pada keanekaragaman hayati (45,71%) dan kegiatan lingkungan (40,00%), sedangkan emisi karbon (17,14%) dan kepatuhan regulasi (14,29%) sangat rendah. Dari *Stakeholder Theory*, hal ini menunjukkan rendahnya respons terhadap isu lingkungan. Dari *Signaling Theory*, minimnya pengungkapan mencerminkan belum dianggapnya informasi lingkungan sebagai sinyal penting. Secara umum, aspek lingkungan belum menjadi prioritas utama UIN.

Temuan ini mengonfirmasi hasil studi AlAli & Aboud (2024) yang menyatakan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan di perguruan tinggi Indonesia masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan ketiadaan regulasi pelaporan yang spesifik. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Italia, di mana universitas telah mengadopsi audit lingkungan rutin serta kebijakan pengelolaan limbah dan emisi yang ketat (Nicolò et al., 2021). Meskipun demikian, terdapat progres positif pada indikator keanekaragaman hayati (45,71%), inisiatif hijau (40,00%), dan promosi isu lingkungan (40,00%). Data ini mengisyaratkan bahwa meski langkah awal menuju kampus berkelanjutan telah dimulai oleh beberapa UIN, upaya tersebut masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis.

4.2.4 Analisis Aspek Keuangan

Investasi besar pada tata kelola lingkungan yang bersifat struktural (Nicolò et al., 2021). Temuan menunjukkan kondisi paling kritis, di mana hanya satu UIN yang mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan satu UIN yang memiliki sustainability report terintegrasi. Dari *Stakeholder Theory*, kondisi ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana negara. Dari *Signaling Theory*, ketiadaan laporan keuangan dapat menjadi sinyal negatif terkait transparansi. Secara keseluruhan, praktik sustainability reporting pada UIN masih sangat terbatas dan belum terstandarisasi, sejalan dengan temuan Abello-Romero et al. (2024).

Terdapat kesenjangan yang lebar antara ekspektasi pelaporan keberlanjutan dan realitas di UIN Indonesia. Mayoritas institusi belum memenuhi standar pengungkapan, kecuali bagi segelintir pionir seperti UIN Jambi dan UIN Purwokerto. Keterlambatan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan universitas di Hong Kong yang telah mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan ke dalam tata kelola komunikasi mereka (An Yi et al., 2020). Lemahnya dukungan regulasi domestik menjadi faktor determinan yang mengonfirmasi teori Abello-Romero et al. (2024) tentang rendahnya kualitas pelaporan tanpa mandat formal. Di sisi lain, dominasi pengungkapan aspek sosial atas aspek lingkungan (58,68% berbanding 27,56%) menunjukkan adanya ketidakseimbangan orientasi. Hal ini mencerminkan bahwa UIN lebih mudah mengadopsi nilai-nilai sosial yang inheren dengan misi akademik dibandingkan melakukan investasi besar pada tata kelola lingkungan yang bersifat struktural (Nicolò et al., 2021).

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan keberlanjutan berbasis website pada 35 Universitas Islam Negeri (UIN) Indonesia masih tergolong kurang (rata-rata 46,91%), dengan ketimpangan yang signifikan antara aspek yang diteliti. UIN cenderung lebih responsif dalam mengomunikasikan aspek sosial (58,68%) dan aspek ekonomi (54,49%), seperti informasi dinilai lebih selaras dengan misi akademik serta kebutuhan langsung pemangku kepentingan. Sebaliknya, pengungkapan aspek lingkungan berada ditingkat yang rendah (27,56%), dan transparansi aspek keuangan berada pada kondisi paling kritis, karena hanya segelintir prionir institusi yang bersedia mempublikasikan laporan formal mereka secara terbuka. Rendahnya angka pengungkapan ini menginformasikan bahwa pemanfaatan platform digital sebagai instrumen akuntabilitas publik di lingkungan UIN belum optimal, yang utamanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, belum adanya standar baku, serta absennya regulasi formal atau mandat mengikat dari pihak regulator

Daftar Pustaka

- Abello-Romero, J., Mancilla, C., Restrepo, K., Walter, S., Dur, I., & Ganga-contreras, F. (2024). *Sustainability Reporting in the University Context — A Review and Analysis of the Literature*. 1–17.
- Agustina, E., & Putri, B. S. (2022). Praktik Pelaporan Berkelanjutan Pada Perusahaan Sustainable Reporting Practices in Companies. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 493–499.
- AlAli, R., & Aboud, Y. Z. (2024). Sustainability Assessment Of Higher Education Institutions: Faculty Members Perspective In Saudi Universities. *GeoJournal of Tourism & Geosites*, 52(1).
- Almashhadani, M., & Almashhadani, H. A. (2023). The impact of sustainability reporting on promoting firm performance. *International Journal of Business and Management Invention*, 12(4), 101–111.
- An, Y., Davey, H., Harun, H., Jin, Z., Qiao, X., & Yu, Q. (2020). Online sustainability reporting at universities: the case of Hong Kong. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(5), 887–901.
- Ardhana, C. P., & Suarni, A. (2024). Online Sustainability Reporting At Muhammadiyah University In South Selawesi. *IECON: International Economics and Business Conference*, 2(1), 262–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.65246/d4yqjz57>
- Arsyam, M., & Tahir, M. Y. (2021). Ragam jenis penelitian dan perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47.
- Jun, H., & Moon, S. (2021). An analysis of sustainability integration in business school curricula: Evidence from Korea. *Sustainability*, 13(5), 2779.
- Jusuf, E., Herwany, A., Kurniawan, P. S., & Gunardi, A. (2020). Sustainability Concept Implementation in Higher Education Institutions of Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(1). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.1.27>
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166, 114104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Mian, S. H., Salah, B., Ameen, W., Moiduddin, K., & Alkhalefah, H. (2020). Adapting universities for sustainability education in industry 4.0: Channel of challenges and opportunities. *Sustainability*, 12(15), 6100.
- Moggi, S. (2023). Sustainability reporting, universities and global reporting initiative applicability: a still open issue. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(4), 699–742. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2022-0257>
- Moneva, J. M., Scarpellini, S., Aranda-Usón, A., & Alvarez Etxeberria, I. (2023). Sustainability reporting in view of the European sustainable finance taxonomy: Is the financial sector ready to disclose circular economy? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(3), 1336–1347.

- Nicolò, G., Aversano, N., Sannino, G., & Polcini, P. T. (2021). Investigating web-based sustainability reporting in Italian public universities in the era of Covid-19. *Sustainability*, 13(6), 1–12. <https://doi.org/10.3390/su13063468>
- Paramita, & Abdul Khaliq. (2025). Do Female Directors Enhance Csr Disclosure? Empirical Findings From Indonesia's Sharia Banking Sector. *Journal on Islamic Economics, Finance & Banking [Z-CONOMICS]*, 1(3).
- Popescu, F., Edu, T., Costel, I., Negricea, Zaharia, R., & Zaharia, R. M. (2020a). How do students assess the sustainability of their university? A comparison between dutch and romanian students from business schools. *Amfiteatru Economic*, 22(54), 411–431. <https://doi.org/10.24188/EA/2020/54/412>
- Popescu, F., Edu, T., Costel, I., Negricea, Zaharia, R., & Zaharia, R. M. (2020b). How do students assess the sustainability of their university? A comparison between dutch and romanian students from business schools. *Amfiteatru Economic*, 22(54), 411–431. <https://doi.org/10.24818/EA/2020/54/412>
- Purnamasari, S., & Trimeiningrum, E. (2022). Analisis Dampak Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 45–61. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.3722>
- Rahmania, S. K. (2025). Pengaruh Sustainability Report Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan: Studi Literatur Review. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 869–873. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.413>
- Ramli, N. M., & Suarni, A. (2026). *Web-Based Sustainability Disclosure Practices in Malaysian Public and Private Universities : Evidence from Content Analysis Approach*. 8(1), 1–17.
- Suarni, A., & Possumah, B. (2024). *How can universities ensure transparency in their website? A case study of Muhammadiyah Higher Education in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.2-8-2023.2341850>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tiscini, R., Martiniello, L., & Lombardi, R. (2022). Circular economy and environmental disclosure in sustainability reports: Empirical evidence in cosmetic companies. *Business Strategy and the Environment*, 31(3), 892–907.
- Vo, T. T. D., Tulião, K. V., & Chen, C.-W. (2022). Work Motivation: The Roles of Individual Needs and Social Conditions. *Behavioral Sciences*, 12(2), 49.
- Xu, R., Liu, J., & Yang, D. (2023). Reputation in CSR Disclosure. *Sustainability*, 15(12).
- Zain, R. N. W., Hendriyani, C., Nugroho, D., & Ruslan, B. (2021). Implementation of CSR Activities from Stakeholder Theory Perspective in Wika Mengajar. *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1), 102–107.